



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **EMIL ELESTIANTO DARDAK**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **208141**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 7.723.662.000**

1. Bangunan Seluas 94 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.544.764.000
2. Bangunan Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT  
, HASIL SENDIRI Rp. 1.694.553.000
3. Tanah Seluas 2505 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 325.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
5. Tanah Seluas 4503 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 550.000.000
6. Tanah Seluas 3162 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/194 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.835.345.000
8. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL  
SENDIRI Rp. 134.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/72 m2 di KAB / KOTA BOGOR,  
HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 150.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.143.308.719
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.046.970.719
III. HUTANG	Rp.	217.597.880
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.829.372.839

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.